

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chaerudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama. Bandung.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali. Jakarta
- J.E. Sahetappy. 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Jimly Asshiddiqie. M Ali Safaat. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta.

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1955, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta.

Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana. Jakarta.

P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Sinar Grafika. Bandung.

_____. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi Alihbahasa Hermoyo*, Cet. Ke-2 Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Citra Aditya . Jakarta

S. H. Alatas. 1986. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. LP3ES. Jakarta.

Soenarto Soerodibroto.2009. *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Rajawali Pers. Jakarta.

Jurnal

Kansil. Fernando I. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Diluar KUHP". *Lex crimen*. Vol. III, Nomor.3. Mei 2014. hlm. 28.

Reza Hidayat. "Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi)" e-jurnal katagolis. Universitas Tadulako. Vol. 33. Nomor 12. Desember 2015. hlm. 3.

Firmansyah Hilipito. Juni 2016. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Privatum*. Vol. IV/No.5. hal. 134.

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt507e81322df2c/tindak-pidana-korupsi/>

<http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html>.

<http://www.scribd.com/doc/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP>.

<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/10/orang-yang-turut-serta-dalam-hukum.html>.

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindakpidana>.

<https://hukamnas.com/jenis-tindak-pidana-korupsi>.

https://sc.bphn.go.id/uploads/919381_leaflet_6.pdf.

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, <http://www.damang.web.id>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Baran/Jasa Di Desa.

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengolaan Keuangan Desa.